

Judul : Anggaran terbatas, Perpustakaan sulit jadi gudang ilmu
Tanggal : Sabtu, 30 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran Terbatas Perpusnas Sulit Jadi Gudang Ilmu

ANGGOTA Komisi IV DPR Ratih Megasari Singkaru menyoroti pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dinilai berdampak serius terhadap upaya meningkatkan literasi bangsa. Peran strategis perpustakaan tidak boleh terpinggirkan hanya karena keterbatasan dana.

Dia menilai, efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap kegiatan literasi di daerah. Ini harus diantisipasi dengan strategi pemanfaatan dana yang lebih efektif.

"Anggaran yang ada sangat kurang, tapi sebaiknya Perpusnas memaksimalkan dengan memperbarui buku-buku usang sesuai perkembangan zaman," ujar Ratih, Kamis (28/8/2025).

Ratih menegaskan, perpustakaan merupakan jantung integrasi literasi di sekolah. Namun banyak perpustakaan daerah masih jauh dari layak dan terabaikan. Padahal, perpustakaan adalah gudang ilmu di setiap daerah.

Legislator Partai NasDem itu mendorong agar Perpusnas berkolaborasi dengan Perpustakaan Daerah (Perpusda) untuk melakukan pembaruan, mulai dari penyediaan co-working space, modernisasi layanan, hingga pembaruan koleksi buku.

"Dulu pelajar dan mahasiswa menjadikan perpustakaan sebagai tempat nongkrong. Se-

karang mereka enggan datang karena fasilitasnya minim," tambahnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana juga prihatin dengan pemangkasan anggaran Perpusnas yang dinilai semakin mempersempit ruang geraknya. Dari total anggaran, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga hanya tersisa kurang dari Rp72 miliar untuk program layanan.

"Keterbatasan dana bisa membuat ribuan pustakawan tidak tersertifikasi. Padahal sertifikasi penting untuk menjaga khazanah intelektual bangsa," tegas politikus PDIP itu.

Dia juga menyoroti ketiadaan anggaran bagi Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta. Dua fasilitas itu semestinya bisa melayani ribuan pengunjung, namun terhambat karena nihil dukungan anggaran. Kondisi ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang wajib belajar gratis 13 tahun.

"Bagaimana mau wajib belajar kalau perpustakaan hanya saja seperti ini?" tandasnya.

Dalam kunjungan ke dapil, Bonnie mengaku menemukan banyak perpustakaan yang kondisinya memprihatinkan.

"Sudah pasti dalam beberapa tahun rusak. Arsip pun banyak yang hancur karena kurang terawat," ujarnya. ■ **PYB**